

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menguraikan dinamika keterkaitan pemilik perusahaan selaku prinsipal serta pengelola perusahaan sebagai *agen*, terjadi akibat pendelegasian wewenang pengelolaan usaha. Perbedaan tujuan antara pihak pemilik dan manajemen berpotensi memicu permasalahan keagenan dan asimetri informasi yang berujung pada timbulnya biaya agensi. Guna menjembatani perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang andal. Kehadiran tata kelola perusahaan berfungsi untuk mendongkrak transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Melalui kerangka ini, teori agensi mendasari urgensi penerapan tata kelola perusahaan sebagai instrumen vital dalam mengendalikan tindakan manajerial (Jensen & Meckling, 2005; Matinheikki & Kauppi, 2022).

Perkembangan teori agensi memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan yang optimal mampu meredam konflik keagenan lewat penguatan fungsi pengawasan, kontrol internal, serta kualitas keputusan bisnis (Guttermann, 2023; Jensen & Meckling, 2005). Keberhasilan tata kelola tersebut sangat ditentukan oleh struktur dewan yang mumpuni dalam melakukan monitoring demi menekan tindakan oportunistik dari pihak manajemen (Hilb, 2021). Khusus pada sektor perbankan, praktik tata kelola yang sehat turut mendongkrak stabilitas perusahaan

sekaligus mengendalikan beragam risiko yang mengancam (Brogi & Lagasio, 2022). Dari alasan tersebut, teori agensi menjadi landasan konseptual yang tepat untuk mengkaji kaitan antara tata kelola dan efektivitas pengawasan (Gutterman, 2023), serta sering dimanfaatkan untuk menguraikan peran tata kelola dalam mengatasi benturan kepentingan antara pemilik dan pengelola usaha (Jensen & Meckling, 2005).

Mekanisme pengelolaan perusahaan mencakup jumlah direksi, proporsi komisaris independen, dan persentase kehadiran rapat direksi yang berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen (Hilb, 2021; Jensen & Meckling, 2005). karakteristik dewan tersebut diyakini mampu memperkuat fungsi monitoring, meningkatkan kualitas pengendalian internal, dan meminimalkan risiko operasional pada industri perbankan (Aslam & Haron, 2021; Nsaibi et al., 2020). Penerapan tata kelola perusahaan yang efektif juga terbukti dapat menurunkan tingkat risiko dan meningkatkan stabilitas perusahaan (Brogi & Lagasio, 2022). Teori agensi menjelaskan bahwa semakin efektif karakteristik dewan, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengendalikan risiko operasional, sehingga teori tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan pengaruh jumlah direksi, proporsi komisaris independen, dan persentase kehadiran rapat direksi terhadap risiko operasional dalam studi ini (Aslam & Haron, 2021; Brogi & Lagasio, 2022; Ofori et al., 2025).

2.1.2 Risiko Operasional

Risiko operasional diposisikan sebagai ancaman krusial dalam dunia perbankan, yang mencakup potensi kerugian akibat tidak berjalannya proses

internal secara tepat, kekeliruan sumber daya manusia, gangguan sistem, hingga faktor luar yang menghambat aktivitas perusahaan (Berger et al., 2022). Dampak dari risiko ini tidak sebatas pada kerugian finansial, melainkan turut mencoreng reputasi, mengikis keyakinan para pemangku kepentingan, serta menggoyahkan stabilitas institusi keuangan (Nsaibi et al., 2020). Seiring dengan perkembangan digitalisasi layanan perbankan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis, pengelolaan risiko operasional menjadi semakin penting sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan (Ofori et al., 2025). Jika dibandingkan dengan risiko kredit maupun pasar, karakteristik risiko operasional lebih menitikberatkan pada efektivitas alur bisnis serta mekanisme kontrol internal (Berger et al., 2022). Karenanya, penanganan risiko operasional bertindak sebagai tolok ukur esensial dalam mengevaluasi mutu pengawasan internal serta daya tahan operasional perusahaan (Marie et al., 2021). Penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko operasional yang efektif mampu mendukung stabilitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan, khususnya pada industri perbankan (Brogi & Lagasio, 2022).

Sifat dasar risiko operasional memperlihatkan bahwa ancaman ini bisa timbul akibat kekeliruan prosedur internal, human error, gangguan teknologi, ataupun faktor luar yang sukar diantisipasi. Situasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk memberlakukan sistem pengawasan internal serta pengelolaan risiko yang andal demi menekan potensi kerugian dalam kegiatan operasional (Berger et al., 2022; Nsaibi et al., 2020). Penelitian empiris pada sektor perbankan umumnya mengukur risiko operasional melalui tingkat eksposur risiko operasional yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian (Ofori et al., 2025). Dari teori agensi, penerapan tata

kelola perusahaan berfungsi sebagai sarana pemantauan guna meminimalkan pertentangan kepentingan antara pemilik dan pihak pengelola perusahaan sehingga dapat menekan risiko operasional (Aslam & Haron, 2021). Karakteristik dewan, seperti jumlah direksi, proporsi komisaris independen, dan persentase kehadiran rapat direksi, diyakini mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan perusahaan yang efektif diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko serta meningkatkan stabilitas aktivitas perbankan pada industri perbankan (Brogi & Lagasio, 2022; Ofori et al., 2025).

2.1.3 Jumlah Direksi

Jumlah direksi mencerminkan karakteristik tata kelola yang menggambarkan ukuran struktur pengurus dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan (Itan & Angellina, 2022). Variabel ini dapat diukur berdasarkan jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab dalam merumuskan strategi, mengarahkan kegiatan operasional, serta mendukung pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan perusahaan (Bhatia & Gulati, 2021). Dalam perspektif teori agensi, jumlah direksi dapat dipandang sebagai salah satu karakteristik struktur tata kelola yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pengelolaan perusahaan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 2005). Struktur direksi yang lebih besar dapat menyediakan keberagaman pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam komunikasi, koordinasi, dan proses pengambilan keputusan antaranggota. Oleh

sebab itu, jumlah direksi yang lebih besar tidak selalu menunjukkan efektivitas tata kelola yang lebih tinggi, sehingga hubungan antara ukuran direksi dan tata kelola perusahaan perlu diuji secara empiris dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan dan konteks industrinya (Bhatia & Gulati, 2021; Itan & Angellina, 2022).

Pada industri perbankan, jumlah direksi berkaitan dengan struktur pengelolaan dan tata kelola dalam menjalankan aktivitas operasional serta pengelolaan risiko perusahaan (Brogi & Lagasio, 2022). Dewan direksi memiliki fungsi dalam mengarahkan kegiatan operasional, merumuskan strategi, serta mendukung pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan (Bhatia & Gulati, 2021). Jumlah direksi diukur berdasarkan keseluruhan anggota dewan direksi yang tercantum dalam *annual report* perusahaan. Jumlah anggota direksi yang lebih besar dapat menyediakan keberagaman pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan serta pengelolaan aktivitas operasional dan risiko (Brogi & Lagasio, 2022). Namun, struktur direksi yang lebih besar juga dapat menghadapi tantangan dalam komunikasi dan koordinasi antaranggota, sehingga keterkaitannya dengan efektivitas pengawasan dan risiko operasional tetap perlu dibuktikan secara empiris. Dengan demikian, jumlah direksi diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat risiko operasional perusahaan melalui fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam penerapan tata kelola perusahaan (Bhatia & Gulati, 2021; Ofori et al., 2025).

2.1.4 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen mencerminkan karakteristik tata kelola yang menggambarkan tingkat kemandirian dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen (Aslam & Haron, 2021). Variabel ini dapat diukur sebagai persentase komisaris independen. Komisaris independen ditandai dengan tidak adanya hubungan keuangan, administratif, kepemilikan, maupun hubungan kekeluargaan dengan pihak pengelola perusahaan dan pemegang kendali yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih objektif (Dahya et al., 2023; Ofori et al., 2025). Fungsi komisaris independen berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (Marie et al., 2021). Dari kerangka teori agensi, keberadaan komisaris independen dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme pengendalian untuk mengurangi potensi ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan pihak pengelola perusahaan. Oleh sebab itu, proporsi komisaris independen yang lebih besar dapat mencerminkan tingkat independensi dewan komisaris yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan (Aslam & Haron, 2021; Jensen & Meckling, 2005).

Pada industri perbankan, proporsi komisaris independen berkaitan dengan struktur pengawasan dan penerapan tata kelola dalam pengelolaan risiko operasional (Ofori et al., 2025). Komisaris independen memiliki fungsi dalam menelaah kebijakan manajemen, melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal, serta mengawasi penerapan manajemen risiko sesuai dengan prinsip

kehati-hatian (Marie et al., 2021). Proporsi komisaris independen dihitung berdasarkan perbandingan komisaris independen dengan total komisaris yang kemudian dikalikan dengan 100%. Persentase yang lebih besar dapat mencerminkan tingkat independensi yang lebih tinggi dalam struktur dewan komisaris, meskipun keterkaitannya dengan efektivitas pengawasan dan risiko operasional tetap perlu dibuktikan secara empiris (Dahya et al., 2023; Ofori et al., 2025). Dengan demikian, proporsi komisaris independen diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat risiko operasional perusahaan melalui fungsi pengawasan dan mekanisme tata kelola yang diterapkan (Ofori et al., 2025).

2.1.5 Persentase Kehadiran Rapat Direksi

Persentase kehadiran rapat direksi mencerminkan tingkat partisipasi anggota direksi dalam mengikuti rapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Song et al., 2021). Variabel ini dapat diukur sebagai persentase kehadiran anggota direksi dalam rapat selama satu tahun. Kehadiran anggota direksi dalam rapat menunjukkan tingkat keterlibatan dalam proses koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan perusahaan, termasuk pembahasan kinerja manajemen, kebijakan perusahaan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan (Sahoo et al., 2023). Kehadiran direksi dalam rapat juga berkaitan dengan keterlibatan dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan perusahaan. Dari kerangka teori agensi, kehadiran anggota direksi dalam rapat dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang mendukung proses monitoring dan mengurangi potensi ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan pihak pengelola perusahaan. Oleh sebab itu, persentase kehadiran rapat direksi yang lebih

tinggi dapat mencerminkan tingkat partisipasi direksi yang lebih besar dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan perusahaan (Jensen & Meckling, 2005; Zaman et al., 2021).

Pada industri perbankan, persentase kehadiran rapat direksi menjadi salah satu karakteristik tata kelola yang dapat mencerminkan tingkat keterlibatan direksi dalam pengelolaan perusahaan (Song et al., 2021). kehadiran anggota direksi dalam rapat memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi, melakukan evaluasi, membahas kebijakan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Sahoo et al., 2023). Persentase kehadiran rapat direksi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kehadiran anggota direksi dengan jumlah rapat yang diikuti, kemudian dikalikan dengan 100%. Persentase kehadiran yang lebih tinggi dapat mencerminkan tingkat keterlibatan direksi yang lebih besar dalam proses tata kelola perusahaan, meskipun hubungan antara persentase kehadiran rapat Direksi dan risiko operasional masih perlu dibuktikan secara empiris. Dengan demikian, persentase kehadiran rapat direksi diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat risiko operasional perusahaan melalui keterlibatan direksi dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan (Song et al., 2021; Zaman et al., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup penelaahan atas karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan topik, variabel, atau objek kajian guna meletakkan fondasi bagi studi yang tengah dikembangkan (Lingard, 2018). Tinjauan ini bertujuan untuk

memetakan perkembangan riset dalam ranah yang serupa sekaligus mengenali persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang masih terbuka untuk dieksplorasi. Di samping itu, telaah pustaka lampau berfungsi untuk menopang penyusunan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, dan penguatan argumen mengenai urgensi riset yang dijalankan. Melalui pemahaman terhadap kajian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh rujukan terkait metode, teknik analisis, serta instrumen yang selaras dengan tujuan studi. Langkah ini sekaligus membantu menghindari duplikasi serta menegaskan posisi dan unsur kebaruan dari penelitian yang diangkat (Boote & Beile, 2005). Oleh sebab itu, tinjauan pustaka terdahulu memegang posisi krusial dalam karya ilmiah karena menyuplai landasan empiris maupun teoritis secara sistematis (Kraus et al., 2024). Dari uraian tersebut, sejumlah studi yang relevan dengan topik ini dirangkum dan disajikan melalui Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Nsaibi et al (2020)	Corporate Governance and Operational Risk: Empirical Evidence	<p>Independen: Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) (X)</p> <p>Dependen: Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>) (Y)</p>	Risiko operasional dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola perusahaan, sehingga penerapan mekanisme pengelolaan yang efektif dapat menekan risiko operasional perbankan.
Berger et al (2022)	Operational Risk is More Systemic than You Think: Evidence from U.S. Bank Holding Companies	<p>Independen: Karakteristik Bank, Keterkaitan Sistemik (Systemic Interconnectedness), dan faktor-faktor risiko lainnya.</p> <p>Dependen: Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)</p>	Penyebaran risiko operasional antarbank menunjukkan adanya sifat sistemik, sehingga pengelolaan risiko operasional yang tepat dapat mempertahankan stabilitas sistem perbankan.

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Ofori et al (2025)	Corporate Governance Effectiveness, Operational Risk and Financial Performance of Banks: The Role of Firm Size	<p>Independen: Jumlah Direksi (<i>Board Size</i>) (X1), Jumlah Komisaris (<i>Board Independence</i>) (X2), Jumlah Rapat Direksi (<i>Board Meeting Frequency</i>) (X3)</p> <p>Dependen: Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>) (Y1), Kinerja Keuangan (<i>Financial Performance</i>) (Y2)</p>	Jumlah direksi berpengaruh negatif terhadap Risiko operasional, sedangkan jumlah rapat direksi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Risiko operasional, meskipun jumlah komisaris tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
Aslam & Haron (2021)	Corporate Governance and Risk-Taking of Islamic Banks: Evidence from OIC Countries	<p>Independen: Jumlah Direksi (<i>Board Size</i>) (X1), Jumlah Komisaris (<i>Board Independence</i>) (X2), Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) (X3)</p> <p>Dependen: Pengambilan Risiko (<i>Risk-Taking</i>) (Y)</p>	Jumlah direksi, Jumlah komisaris memengaruhi tingkat Pengambilan risiko pada bank syariah, sehingga karakteristik dewan berperan dalam efektivitas pengawasan risiko.
Bhatia & Gulati (2021)	Board Governance and Bank Performance: A Meta-Analysis	<p>Independen: Tata Kelola Dewan (<i>Board Governance</i>) (X1), Jumlah Direksi (<i>Board Size</i>) (X2), Jumlah Komisaris (<i>Board Independence</i>) (X3)</p> <p>Dependen: Kinerja Bank (<i>Bank Performance</i>) (Y)</p>	Tata kelola dewan berpengaruh positif terhadap Bank Performanc Kinerja bank, meskipun besar pengaruhnya dipengaruhi karakteristik kelembagaan masing-masing negara.
Itan & Angellina (2022)	The Mediating Role of Board Size and Working Capital Management in Corporate Governance on Firm Performance	<p>Independen: Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) (X)</p> <p>Mediasi: Jumlah Direksi (<i>Board Size</i>) (Z1), Manajemen Modal Kerja (<i>Working Capital Management</i>) (Z2)</p> <p>Dependen: Kinerja Perusahaan (<i>Firm Performance</i>) (Y)</p>	Jumlah direksi menunjukkan peran mediasi dalam keterkaitan antara tata kelola perusahaan dengan pencapaian kinerja melalui penguatan pengaruh yang diberikan, sehingga keberadaannya menjadi faktor penting dalam hubungan tersebut.
Oon et al (2026)	Board Meeting Frequency and Firm Performance:	Independen: Jumlah Rapat Direksi (<i>Board Meeting Frequency</i>) (X)	Jumlah rapat direksi berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan. Pengaruh tersebut menjadi

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Unpacking the Moderating Effects of Monitoring and Advisory Roles	Moderasi: Peran Pemantauan (Monitoring Role), Peran Penasihat (Advisory Role) (Z) Dependen: Kinerja Perusahaan (<i>Firm Performance</i>) (Y)	lebih kuat ketika fungsi monitoring dan advisory dewan berjalan secara efektif, sehingga jumlah rapat direksi merupakan indikator penting efektivitas tata kelola perusahaan.
Dahya et al (2023)	Does Board Independence Matter in Companies with a Controlling Shareholder?	Independen: Independensi Dewan (<i>Board Independence</i>) (X) Dependen: Efektivitas Tata Kelola dan Nilai Perusahaan (<i>Corporate Governance Effectiveness/Firm Value</i>) (Y)	Independensi dewan tetap berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, terutama dalam memperkuat fungsi monitoring terhadap manajemen pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali.
Marie et al (2021)	How Does Internal Governance Affect Banks' Financial Stability? Empirical Evidence from Egypt	Independen: Tata Kelola Internal (<i>Internal Governance</i>) (X) Dependen: Stabilitas Keuangan (<i>Financial Stability</i>) (Y)	Tata kelola internal yang efektif meningkatkan Stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan sistem pengendalian internal.
Brogi & Lagasio (2022)	Better Safe Than Sorry: Bank Corporate Governance, Risk-Taking, and Performance	Independen: Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) (X) Dependen: Pengambilan Risiko (<i>Risk-Taking</i>), Kinerja Bank (<i>Bank Performance</i>) (Y)	Penerapan tata kelola yang efektif tetap berperan penting dalam mengurangi pengambilan risiko, terutama melalui penguatan fungsi pengawasan dewan terhadap aktivitas bank.

2.3 Kerangka Konseptual

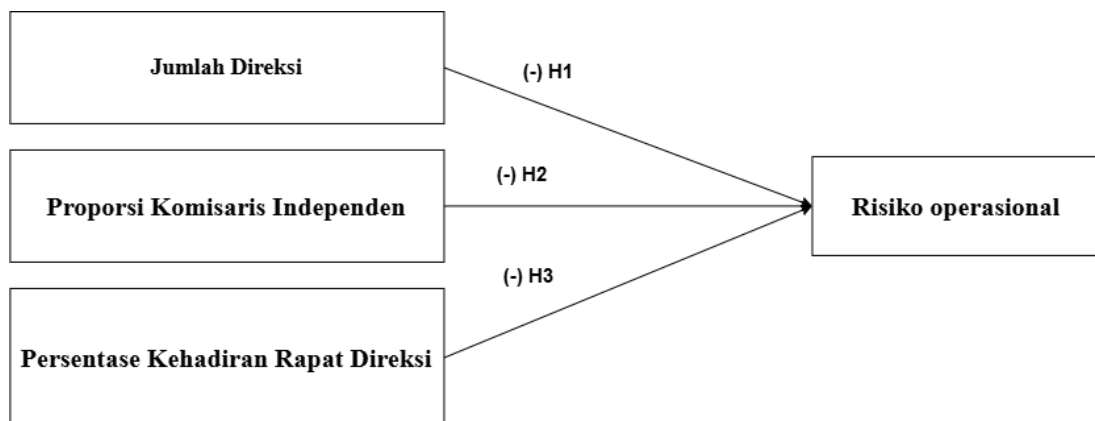
Risiko operasional merupakan salah satu ancaman utama dalam sektor perbankan yang dapat menimbulkan kerugian akibat kelemahan prosedur internal, kesalahan sumber daya manusia, gangguan teknologi, maupun faktor eksternal. Perkembangan digitalisasi layanan dan semakin kompleksnya aktivitas bisnis

meningkatkan urgensi pengelolaan risiko operasional melalui penerapan sistem pengendalian yang andal. Mekanisme pengelolaan perusahaan yang efektif berperan penting dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian internal sehingga dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik (Ofori et al., 2025).

Teori agensi menjelaskan bahwa mekanisme pengendalian dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola (Jensen & Meckling, 2005). Karakteristik dewan yang direpresentasikan oleh jumlah Direksi, proporsi Komisaris Independen, dan persentase kehadiran rapat Direksi merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang dapat mendukung efektivitas pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko perusahaan. Dengan demikian, karakteristik dewan yang lebih efektif diharapkan dapat memperkuat mekanisme tata kelola dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan risiko operasional (Handoko & Probohudono, 2021; Wang & Hsu, 2021).

Variabel jumlah direksi ditentukan melalui total keseluruhan anggota dewan direksi pada masing-masing perusahaan. Variabel proporsi komisaris independen direpresentasikan lewat proporsi komisaris independen di dalam susunan dewan. Di sisi lain, persentase kehadiran rapat direksi dihitung dari total pelaksanaan pertemuan direksi per tahun sebagaimana termuat di dalam laporan tahunan perusahaan. Seluruh variabel tersebut merefleksikan tingkat efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan. Adapun variabel dependen, yaitu risiko operasional, diukur menggunakan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional yang mencerminkan besarnya eksposur

risiko operasional yang dihadapi bank. Pengukuran tersebut diharapkan mampu menggambarkan tingkat risiko operasional perusahaan secara objektif (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2023; Song et al., 2021; Wang & Hsu, 2021). Pembahasan sebelumnya menjadi landasan dalam membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara jumlah direksi proporsi komisaris independen, dan persentase kehadiran rapat direksi dengan risiko operasional. Ketiga dimensi karakteristik dewan tersebut ditempatkan sebagai variabel bebas, sementara risiko operasional diposisikan sebagai variabel terikat. Keterkaitan antarvariabel ini berakar pada teori agensi yang menggarisbawahi urgensi sistem pengawasan guna menekan konflik keagenan. Melalui mekanisme pengawasan yang berjalan optimal, mutu pemantauan serta kontrol internal perusahaan diyakini dapat meningkat secara signifikan (Jensen & Meckling, 2005; Wang & Hsu, 2021). Semakin baik karakteristik dewan, semakin efektif perusahaan dalam mengendalikan risiko operasional. Kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian mengenai pengaruh jumlah direksi, proporsi komisaris independen, dan persentase kehadiran rapat direksi terhadap risiko operasional pada perusahaan (Wang & Hsu, 2021; Zaman et al., 2021). Dari uraian tersebut dalam studi ini kerangka pemikirannya tampak pada gambar 2.1 yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Jumlah Direksi Dan Risiko Operasional

Jumlah direksi merupakan salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang memperlihatkan jumlah anggota direksi yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan (Brogi & Lagasio, 2022). Industri perbankan menempatkan jumlah direksi sebagai salah satu aspek penting karena berkaitan dengan efektivitas pengelolaan berbagai risiko, termasuk risiko operasional (Aslam & Haron, 2021). Jumlah direksi yang memadai memungkinkan pembagian tugas, koordinasi, dan pengawasan terhadap aktivitas operasional berjalan lebih efektif (Ofori et al., 2025). Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan mutu proses penetapan keputusan serta memperkuat mekanisme pengawasan internal perusahaan (Brogi & Lagasio, 2022). Melalui pengawasan yang lebih optimal, penerapan manajemen risiko diharapkan menjadi lebih efektif dalam mengendalikan aktivitas operasional. Dengan demikian, jumlah direksi dipandang sebagai salah satu mekanisme

pengelolaan perusahaan yang berpotensi memengaruhi kondisi risiko operasional pada industri perbankan (Basty et al., 2023).

Mengacu pada kerangka teori agensi, jumlah direksi berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang mampu meredam benturan kepentingan lewat optimalisasi fungsi pengawasan. Keberadaan jumlah direksi yang proporsional membuka peluang bagi pembagian tugas, pemantauan, serta pengambilan keputusan yang jauh lebih efisien. Khusus dalam sektor perbankan, kapasitas dewan direksi memegang peranan krusial untuk mengenali, menilai, serta mengendalikan risiko operasional. Kapasitas yang memadai tersebut sekaligus menopang penguatan kontrol internal beserta penerapan manajemen risiko yang handal. Semakin optimal jumlah direksi, semakin efektif fungsi pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, keberadaan direksi yang memadai dapat meningkatkan kualitas koordinasi dalam merespons potensi gangguan operasional. Pengawasan yang lebih kuat memungkinkan perusahaan mendeteksi permasalahan lebih awal dan mengambil tindakan korektif secara tepat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan, kegagalan proses, maupun kerugian akibat risiko operasional. Dengan demikian, jumlah direksi diperkirakan berhubungan negatif dengan risiko operasional karena semakin efektif pengawasan, semakin rendah risiko operasional perusahaan (Adelopo et al., 2021; Ofori et al., 2025).

Bukti empiris mengindikasikan bahwa jumlah direksi memegang peranan krusial dalam mendongkrak efektivitas tata kelola serta menekan risiko operasional. Kajian Ofori et al (2025) menegaskan bahwa jumlah direksi berdampak negatif

secara signifikan terhadap risiko operasional, menyiratkan bahwa penguatan ukuran dewan memperkuat pemantauan atas aktivitas manajemen sehingga risiko yang dihadapi bank semakin kecil. Hasil tersebut selaras dengan studi Brogi & Lagasio (2022) yang mengemukakan bahwa susunan dewan yang optimal mampu mereduksi tingkat pengambilan risiko lewat perbaikan mutu pengawasan dan kontrol internal. Lebih lanjut, Bhatia & Gulati (2021) mendapati pula bahwa karakteristik dewan berkontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas tata kelola serta kinerja perbankan. Alhasil, jumlah direksi menjadi salah satu instrumen tata kelola yang esensial dalam menopang penanganan risiko pada industri perbankan. Bertolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa:

H1 : Jumlah direksi berpengaruh negatif terhadap risiko operasional pada perusahaan sektor perbankan.

2.4.2 Proporsi Komisaris Independen Dan Risiko Operasional

Proporsi komisaris independen mencerminkan salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang menunjukkan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Komisaris independen merupakan anggota dewan yang diharapkan tidak memiliki hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan pihak manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif. Pada industri perbankan, keberadaan komisaris independen menjadi relevan karena bank menghadapi kompleksitas kegiatan usaha dan berbagai bentuk risiko yang memerlukan pengawasan tata kelola yang memadai. Proporsi komisaris independen dapat berkaitan dengan kualitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan

strategis manajemen serta penerapan pengendalian internal. Dengan demikian, proporsi komisaris independen dapat dipandang sebagai salah satu karakteristik tata kelola yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan risiko operasional pada sektor perbankan (Javed et al., 2024; Ofori et al., 2025).

Penerapan teori agensi menempatkan proporsi komisaris independen sebagai salah satu mekanisme monitoring yang berkaitan dengan upaya mengurangi potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 2005). Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang dapat berkaitan dengan akuntabilitas dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks perbankan, fungsi pengawasan tersebut juga berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Namun, hubungan antara tingkat independensi dewan dan risiko bank tidak selalu menunjukkan arah yang seragam dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, proporsi komisaris independen diduga memiliki keterkaitan dengan risiko operasional, tetapi arah dan besarnya hubungan tersebut perlu dibuktikan secara empiris (Brogi & Lagasio, 2022; Jensen & Meckling, 2005).

Temuan empiris mengenai hubungan karakteristik independensi dewan dengan risiko dan stabilitas perbankan juga menunjukkan hasil yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Brogi & Lagasio (2022) menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan tingkat pengambilan risiko serta kinerja perbankan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data panel. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan berkaitan dengan tingkat pengambilan risiko dan kinerja perbankan. Penelitian Marie et al (2021)

juga menunjukkan adanya keterkaitan antara mekanisme internal *governance*, termasuk karakteristik dewan, dengan stabilitas keuangan perbankan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik dan fungsi pengawasan dewan memiliki keterkaitan dengan kondisi risiko dan stabilitas perbankan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik independensi dewan dengan risiko dan stabilitas perbankan masih perlu dikaji lebih lanjut. Dari argumentasi tersebut, riset ini mengajukan hipotesis bahwa:

H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap risiko operasional pada perusahaan perbankan.

2.4.3 Persentase Kehadiran Rapat Direksi Dan Risiko Operasional

Persentase kehadiran rapat direksi merepresentasikan salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat keterlibatan anggota direksi dalam pelaksanaan rapat, koordinasi, serta proses pengambilan keputusan perusahaan (Song et al., 2021). Kehadiran anggota direksi dalam rapat memberikan kesempatan untuk membahas kinerja manajemen, kebijakan perusahaan, serta berbagai permasalahan dan potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Pada sektor perbankan, persentase kehadiran rapat direksi menjadi relevan karena kompleksitas kegiatan operasional dan berbagai risiko yang dihadapi bank memerlukan keterlibatan aktif anggota direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan (Song et al., 2021; Zaman et al., 2021). Tingkat kehadiran yang lebih tinggi dapat mencerminkan keterlibatan anggota direksi dalam pembahasan pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta proses pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, persentase kehadiran rapat direksi dapat

dipandang sebagai salah satu karakteristik tata kelola yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan risiko operasional perbankan (Song et al., 2021; Wang & Hsu, 2021).

Berdasarkan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (2005), hubungan antara persentase kehadiran rapat direksi dan risiko operasional dapat dianalisis melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai. Dalam konteks tersebut, persentase kehadiran rapat direksi yang lebih tinggi dapat mencerminkan tingkat keterlibatan anggota direksi dalam pembahasan kebijakan, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko perusahaan. Kehadiran dalam rapat juga memberikan ruang bagi anggota direksi untuk memperoleh informasi, melakukan monitoring terhadap manajemen, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, persentase kehadiran rapat direksi diduga memiliki keterkaitan dengan risiko operasional karena tingkat keterlibatan anggota direksi dalam rapat dapat mendukung pelaksanaan tata kelola, monitoring, dan pengelolaan perusahaan (Jensen & Meckling, 2005; Zaman et al., 2021).

Bukti empiris menunjukkan adanya keterkaitan antara karakteristik rapat dewan dengan kondisi risiko dan stabilitas perbankan. Kajian dari Ofori et al (2025) menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola, termasuk frekuensi rapat dewan, berkaitan dengan risiko operasional pada sektor perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, Aslam & Haron (2021) menemukan adanya hubungan antara karakteristik

tata kelola dewan, termasuk jumlah rapat dewan, dengan risiko bank. Sementara itu, Marie et al (2021) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan berkaitan dengan stabilitas keuangan bank. Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut lebih banyak menggunakan jumlah atau frekuensi rapat sebagai ukuran aktivitas dewan, sehingga belum secara spesifik menggambarkan tingkat keterlibatan anggota direksi dalam setiap rapat yang diselenggarakan. Persentase kehadiran rapat direksi memberikan sudut pandang yang berbeda karena mengukur tingkat partisipasi anggota direksi berdasarkan kehadirannya dalam rapat, yang dapat mencerminkan keterlibatan dalam pembahasan kebijakan, pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta proses pengambilan keputusan perusahaan (Song et al., 2021; Zaman et al., 2021). Dengan demikian, perbedaan pengukuran antara jumlah atau frekuensi rapat dan persentase kehadiran anggota direksi menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji lebih lanjut keterkaitan persentase kehadiran rapat direksi dengan risiko operasional pada sektor perbankan (Ofori et al., 2025; Song et al., 2021). Dari wawasan ini, studi ini menghipotesiskan bahwa:

H3 : Persentase kehadiran rapat direksi berpengaruh negatif terhadap risiko operasional pada perusahaan perbankan.